

Pemkab Sukoharjo Bangun Gedung Pertemuan

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo direncanakan segera memulai pembangunan Gedung Pertemuan Sukoharjo. Persiapan proyek besar ditengah kota tersebut terus mengalami perkembangan. Terbaru sudah dilaksanakan teken kontrak jasa konsultan Manajemen Konstruksi (MK). Sedangkan lelang pembangunan fisik sudah tahap surat penunjukan penyedia barang jasa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Sabtu (3/2) mengatakan, Pemkab Sukoharjo hingga saat ini masih terus melakukan tahapan persiapan pembangunan Gedung Pertemuan Sukoharjo. Tahapan yang sudah selesai dilakukan yakni lelang jasa konsultan MK. Bahkan sekarang sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja jasa konsultan MK.

Lelang jasa konsultan MK diketahui memiliki nilai pagu Rp 1.125.000.000 dan HPS Rp 1.099.800.000. Pemenang lelang dengan nilai harga kontrak Rp 799.207.215. "Untuk lelang MK selesai dan sudah teken kontrak. Tinggal menunggu lelang pembangunan fisik selesai semua," ujarnya.

Tahapan lelang pembangunan fisik Gedung Pertemuan Sukoharjo sekarang sudah masuk tahap surat penunjukan penyedia barang jasa. Selanjutnya pada 2-7 Februari 2024 tahapan berikutnya yakni penandatanganan kontrak kerja.

"Awal Februari ini kami harap penandatanganan kontrak kerja lelang pembangunan fisik Gedung Pertemuan Sukoharjo sudah terlaksana. Selanjutnya segera tinggal pelaksanaan pembangunan saja," lanjutnya. Lelang pembangunan fisik Gedung Pertemuan Sukoharjo memiliki nilai pagu sebesar Rp 40.000.086.000. Sedangkan nilai HPS Rp 39.535.980.000.

DPUPR Sukoharjo secara resmi sudah menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Gedung Pertemuan Sukoharjo ke Pemkab Sukoharjo. Ada dua hal yang disampaikan ke Bupati Sukoharjo Etik Suryani yakni pertama terkait lelang MK dan kedua lelang pembangunan fisik. Bowo menjelaskan, pada pelaksanaan pembangunan nanti ada sedikit perubahan desain yakni terkait pagar. Pada desain lama Gedung Pertemuan Sukoharjo menggunakan pagar pembatas sedangkan desain baru tidak menggunakan pagar.

"Desain lama ada pagar dan terbaru tidak ada pagar. Sementara itu perubahannya. Tapi masih akan kami sampaikan lagi ke depan ada tidak pembangunan pagar," lanjutnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini sangat serius menyelesaikan pembangunan Gedung Pertemuan Sukoharjo. Sebab proses pembangunan sebelumnya sempat terhenti karena ada masalah. Pemkab Sukoharjo sekarang sudah melakukan tahapan pembangunan dengan melaksanakan proses lelang MK dan fisik bangunan. Diharapkan lelang dapat berjalan dengan lancar dan awal februari sudah bisa teken kontrak kerja. "Masih lelang pembangunan fisik bangunan. Diharapkan segera selesai dan sesuai jadwal pada awal Februari nanti bisa teken kontrak kerja dengan pemenang lelang," ujarnya. **(Mam)-f**

DPUPR Sukoharjo Pantau Infrastruktur

SUKOHARJO (KR) Infrastruktur jalan dan jembatan dipantau mengingat curah hujan terus mengalami peningkatan. Kondisi cuaca sekarang dikhawatirkan berpengaruh pada kondisi bangunan yang bisa mengakibatkan kerusakan dampak bencana alam.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Minggu (4/2) mengatakan, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo seperti jalan dan jembatan sudah dalam keadaan baik setelah sebelumnya pada tahun 2023 lalu selesai dikerjakan pembangunan. Namun demikian melihat cuaca dimana curah hujan terus mengalami peningkatan dikhawatirkan berdampak pada kerusakan akibat bencana alam.

DPUPR Sukoharjo memantau dengan menerjunkan petugas keliling wilayah. Koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. "Sementara masih aman, tapi tetap kami pantau karena curah hujan terus meningkat dan dikhawatirkan terjadi bencana alam yang berdampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan," ujarnya. Hasil pemantauan sementara belum ditemukan kerusakan infrastruktur. DPUPR Sukoharjo memastikan bangunan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan.

Curah hujan yang tinggi dikhawatirkan berdampak merusak jalan karena terjadi banjir dan genangan air. Beberapa wilayah berpotensi banjir dan genangan air sehingga rasan terjadi kerusakan jalan. "Untungnya kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan perencanaan matang mengantisipasi banjir dan genangan air dengan pelebaran dan dibuatkan sistem pembuangan air. Selain itu juga jalan dibangun dengan menggunakan sistem cor beton," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo meminta keterlibatan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Apabila ada temuan kerusakan maka bisa segera dilaporkan dan dikoordinasikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan. "Perbaikan kerusakan sesuai kewenangan sebab jalan ada yang menjadi kewenangan nasional, provinsi, daerah dan desa. Termasuk juga jembatan, selain itu ada talud yang jadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS)," lanjutnya.

Masyarakat juga ikut dilibatkan dalam membantu pemantauan infrastruktur. Namun demikian masyarakat perlu mendapat pemahaman dan edukasi mengenai kewenangan perbaikan kerusakan. "Masyarakat dipersilahkan membantu memantau. Tapi catatannya ketika ada kerusakan maka perbaikan disesuaikan dengan kewenangan. Sering kali masyarakat protes kerusakan jalan dan setelah kami cek itu bukan kewenangan Pemkab Sukoharjo melainkan daerah lain atau bahkan tugas pusat atau provinsi," lanjutnya.

Bowo mengatakan, saluran air atau drainase menjadi salah satu perhatian utama infrastruktur yang dipantau saat memasuki musim hujan. Sebab saluran air yang tersumbat menjadi sumber masalah genangan dan banjir. Penyumbatan terjadi karena berbagai faktor salah satunya tumpukan sampah. Selain itu juga sedimentasi pasir mengakibatkan daya tampung air di saluran berkurang. **(Mam)-f**

Persiapan Pemilu 2024 Hampir Sempurna

MAGELANG (KR) - Persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Kabupaten Magelang hampir sempurna, sudah di atas 90 persen. Meski demikian tindak lanjutnya terus dilakukan, termasuk pengecekan-pengecekannya. Demikian dikemukakan Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto SH MH kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Mensukseskan Pemilu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan PDAM Kabupaten Magelang, Jumat (2/2) sore.

Didampingi Komandan Kodim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto SH MSi, Ketua KPU Kabupaten Magelang Affiuddin SAg, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Saleh, Kajari Kabupaten Magelang, Kabag Ops Polresta Magelang Kopol Eko Mardiyanto, Pj Bupati Magelang mengatakan waktu yang tinggal beberapa hari ini terus dilakukan pemantauan

oleh semua pihak. "Seluruh pemangku kepentingan, seluruh pihak harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan ini, tanpa ada apa-apa di Kabupaten Magelang," katanya.

Dalam rakor yang dihadiri banyak pihak, termasuk seluruh Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan se Kabupaten Magelang maupun lainnya tersebut juga disampaikan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Mensukseskan Pemilu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan PDAM Kabupaten Magelang, Jumat (2/2) sore. Dalam rakor yang dihadiri banyak pihak, termasuk seluruh Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan se Kabupaten Magelang maupun lainnya tersebut juga disampaikan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Mensukseskan Pemilu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan PDAM Kabupaten Magelang, Jumat (2/2) sore.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 harus berjalan aman, nyaman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta bermartabat.

Semua pihak diajak untuk saling bekerja sama, sehingga Pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa ma-

syarakat telah kian cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan dalam berdemokrasi.

Pemungutan suara yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, yang tinggal menyisakan beberapa hari lagi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupa-

ten Magelang harapannya diatas 80 persen.

Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, lurah maupun lainnya diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) guna menggunakan hak pilihnya.

Selain Pj Bupati Mage-

leng, beberapa pihak juga menyampaikan informasinya, termasuk Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Kabag Ops Polresta Magelang, Komandan Kodim 0705/Magelang, Kajari Kabupaten Magelang. Peninjauan ke beberapa gudang penyimpanan logistik juga dilakukan usai rapat koordinasi. **(Tha)-f**



Pj Bupati Magelang meninjau Gudang Logistik yang ada di Kantor Desa Deyangan Mertoyudan Magelang.

Pengangguran Terbuka di Salatiga 5.180 Orang

SALATIGA (KR) - Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Salatiga, Susanto Adi W mengatakan jumlah pengangguran sampai akhir 2023 tercatat 5.180 orang. "Pengangguran terbuka tercatat 5.180 orang, atau 4,75 persen" kata Susanto Adi W kepada KR, Jumat (2/2).

Berkaitan mengatasi pengangguran, Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Yasip Khasani, sangat mengapresiasi program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Salatiga Makmur.

Pada program tersebut, BAZNAS membantu permodalan, alat kerja dan pendampingan terhadap setidaknya 25 UMKM setiap bulan.

Namun Yasip menyarankan, agar program Salatiga Makmur tidak hanya menasar kelompok UMKM saja, tetapi juga menolong pengangguran di Kota Salatiga. iSalatiga Makmur ini menarik, tinggal kita perluas. Tapi sasaran Salatiga Makmur jangan cuma UMKM, tapi justru yang masih nganggur itu yang harus kita to-

long. BAZNAS nanti dengan permodalannya, kami dengan pelatihannya," kata Yasip Khasani pada Kamis (2/2) lalu saat menerima audiensi pengurus BAZNAS Salatiga.

Yasip berharap, pengangguran yang telah mendapat bantuan itu nantinya juga akan melakukan hal yang sama. Yakni, setelah usaha mereka berjalan, maka zakat mereka akan masuk ke BAZNAS untuk digunakan hal yang sama. Dimana, pemuda-pemuda yang nganggur diberikan modal untuk menjalankan usaha, tapi mereka wajib nantinya mensponsori pemuda-pemuda yang nganggur lainnya, sehingga uang terus bergulir. "Tapi uniknya Indonesia, orang nganggur bisa beli rokok se-

tiap hari, bisa ngisi paket data, bahkan bisa nyicil motor. Itu hanya ada di Indonesia, ujarnya.

Lebih jauh, Yasip akan mengkaji ulang pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemkot Salatiga apakah sudah 100 persen. Selain itu, ia melihat potensi zakat dari perusahaan swasta yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Sebab, terjadi konotasi di masyarakat bahwa BAZNAS hanya untuk pegawai negeri saja. Oleh karena itu menjadi tugas baru bagi BAZNAS untuk melakukan sosialisasi bagi para pekerja sektor swasta dan mengajak mereka membayar zakat melalui BAZNAS.

Ketua Baznas Kota Salatiga, Ari Hidayah Iswanto menyampaikan, program utama BAZNAS adalah mengelola zakat, infak dan sedekah yang fokusnya kepada ASN di Pemerintah Kota Salatiga dan juga di Kemenag. Ia beraudiensi dengan Pj. Walikota Salatiga dalam rangka meningkatkan pundi zakat sehingga pemanfaatannya bisa lebih banyak kepada

masyarakat.

Dikatakannya bahwa, penggunaan BAZNAS memang 100 persen kembali kepada masyarakat, terutama untuk fakir miskin.

BAZNAS Kota Salatiga memiliki 5 program yang sudah berjalan, yaitu Salatiga Cerdas yang hubungannya dengan pemberian bantuan pendidikan untuk anak-anak. Kemudian program Salatiga Sehat untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah di kesehatan, Salatiga Barokah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan yang paling utama adalah Salatiga makmur.

"Program unggulan BAZNAS Salatiga adalah Salatiga Makmur. Setiap bulan, kami membantu 20 hingga 25 UMKM untuk kita dampingi dan kita berikan modal serta alat usaha. Alhamdulillah, di tahun 2023 BAZNAS Salatiga mendapat penghargaan nomor dua di Jawa Tengah kategori kepercayaan publik terhadap lembaga Baznas," kata Ari Hidayah. **(Sus)-f**

KPU Sukoharjo Kirim Logistik Pemilu 2024

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melakukan pengiriman logistik Pemilu 2024 ke tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Proses pengiriman sudah berjalan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kartasura, Gatak dan Baki. Pada proses tersebut petugas menemukan ada kerusakan kotak suara.

Pengiriman masih dilakukan hingga selesai semua di 12 kecamatan. Temuan kerusakan logistik Pemilu 2024 nanti akan dilakukan penggantian oleh KPU Sukoharjo. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, Sabtu (3/2) mengatakan, KPU Sukoharjo mulai melakukan pengiriman logistik Pemilu 2024 sejak 31 Januari 2024 lalu. Sampai sekarang proses masih terus berjalan.

KPU Sukoharjo melakukan pengiriman logistik Pemilu 2024 dimulai dari wilayah terjauh meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak dan Baki. Tiga kecamatan yang masuk daerah pemilihan (Dapil) 3 tersebut mendapat prioritas. Selain karena jauh, juga jumlah logistik yang dikirim banyak.

KPU Sukoharjo pada proses pengiriman pertama logistik Pemilu 2024 di Kecamatan Kartasura, Gatak dan Baki memastikan barang dikirim sudah sesuai kebutuhan. Logistik Pemilu 2024 setelah ti-

ba di tempat tujuan di kantor kecamatan kemudian melakukan pengecekan. Hal ini untuk mengetahui kondisi logistik Pemilu 2024 apakah ada kerusakan atau tetap aman keadaan baik setelah melalui proses pengangkutan barang.

Hasil pengecekan diketahui ada temuan kerusakan logistik Pemilu 2024 berupa kotak suara. Temuan didapati di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak masing-masing satu kotak suara. Kerusakan sudah dilaporkan resmi ke KPU Sukoharjo dan akan dilakukan penanganan. "Ada temuan kerusakan barang logistik Pemilu 2024 pada proses pengiriman ke Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak masing-masing satu kotak suara," ujarnya.

KPU Sukoharjo nantinya akan melakukan penanganan dengan memberikan kebutuhan satu kotak suara pengganti yang rusak. Penggantian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. "Hanya satu kotak suara saja yang rusak kemungkinan karena tersangkut benda saat proses pengiriman," lanjutnya. KPU Sukoharjo memastikan tidak ada kerusakan logistik Pemilu 2024 lainnya seperti surat suara. Sebab logistik Pemilu 2024 lain yang berada didalam kotak suara dalam proses pengiriman masih tetap utuh dan aman tanpa kerusakan. Syakbani mengatakan,

sebelum dilakukan pengiriman KPU Sukoharjo melakukan pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024. Pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 dilakukan setelah tahapan sebelumnya berupa sortir dan pelipatan surat suara selesai dilaksanakan. Untuk tahap pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu

2024 ini dilakukan meliputi kotak suara DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

KPU Sukoharjo melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tahapan pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024. Petugas memantau langsung pekerja agar tidak terjadi kesalahan. Nantinya setelah semua proses pengepakan

atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 selesai, KPU Sukoharjo akan langsung melakukan pengiriman ke tingkat kecamatan. Sasaran utama dilakukan di wilayah yang jaraknya jauh seperti Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Baki. Sedangkan kecamatan lainnya menyusul berikutnya. **(Mam)-f**

Mimbar Legislatif

DPRD Dukung Laporan Keuangan 2023 Guna Tata Pemerintahan Baik

WAKIL Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menyatakan, pentingnya laporan keuangan untuk mendorong strategi pemerintahan yang baik. Selain itu juga untuk menjaga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun diterima oleh Pemprov dan DPRD Jawa Tengah bisa dipertahankan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono disela-sela mengikuti kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Auditorium BPK RI, Jakarta, pekan lalu.

DPRD berharap program Pemprov Jawa Tengah bisa lebih terkoordinasi dalam pelaporan keuangan, dan diharapkan predikat WTP yang selama ini Pemerintah Jawa Tengah dapat, masih bisa dipertahankan pada tahun ini.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit meminta kepada seluruh kementerian

/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan 2023 yang akan segera dimulai. Adapun tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah kepatuhan dalam undang-undang. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab kepatuhan terhadap undang-undang, dan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai cara akuntabel penganggaran pemerintah daerah dalam sistem pembangunan di daerah. Melalui SIPD, semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi satu ruang, sehingga dapat terkontrol dengan baik. (*)-f

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)